

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arie Sukanti Hutagalung, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012)
- Arba & Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002)
- Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Jakat Media Publishing, 2021)
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, (Medan: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Eli Wuria Dewi, *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah & Segala Perizinannya*, (Yogyakarta; Buku Pintar, 2014)
- Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: Tatanusa, 2018)
- Hadi Arnowo & Waskito, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Hanafi, *Hukum Agraria Diktat Hukum Agraria*, (Jatim: Duta Media Publishing, 2016)
- Hadi Arnowo & Waskito, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Muh Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1994)
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Sari Mayang Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Jurnal Nasional

- Ardiles Eric Panget, "Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda", *Lex Administratum*, Vol 1, No. 3 Juli (2013)

- Darwis Anatami, “Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12, (2017)
- Indri Hadisiswati, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, *Jurnal Ahkam*, Vol.2, No. 1 (2014)
- Okky Ditya Argo, “Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, (2014)
- Ricardo Sorongan, “Dampak Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)”, *Lex et Societatis*, Vol III No.5 April, (2015)
- Tony Prayoga, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, (2016)
- Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni, “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional”, *Notarius*, Vol 13, No 1 (2020) DOI: 10.14710/nts.v13i1.29170

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)
- Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Website

Letezia Tobing, “Apakah Hak Tanggungan Tetap Berlaku Jika Tanah Disengketakan”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b4985b9812c/apakah-hak-tanggungan-tetap-berlaku-jika-tanah-disengketakan> ,diakses tgl 6 Desember 2021

Muhdany Yusuf Laksono, “Kurun 2018-2020, Ada 3145 Kasus Sengketa Pertanahan yang Belum Diselesaikan”.

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/06/090000721/kurun-2018-2020-ada-3.145-kasus-sengketa-pertanahan-yang-belum?page=all>, diakses pada 6 November 2021

Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum Fatwa dan Hukum Positif”.
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>, diakses pada 18 November 2021

Tri Jata Ayu, “Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum>, diakses pada 18 November 2021

Yanita Petriella, “Kementrian ATR/BPN Berhasil Selesaikan 5.470 Kasus Sengketa Tanah”.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/47/1451111/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-5470-kasus-sengketa-tanah>, diakses pada 6 November 2021

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Dr. Gunanegara, SH, M.Hum selaku Dosen Universitas Pelita Harapan pada tanggal 8 November 2021